



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD EMAWAN PUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **852298**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/110 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **197.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **165.132.143**

F. HARTA LAINNYA Rp. **219.000.000**

Sub Total Rp. **1.881.132.143**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.881.132.143**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.